

**ARTIKEL LAPORAN HASIL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



Judul:

**PENGEMBANGAN ORGANISASI KELURAHAN
DI KAWASAN EKOWISATA MEMPURA**

Oleh:

Dra. Hj Prihati, MSi-NIP 195806101987032007/ Ketua
Dra. Hj Hernimawati, MSi-NIDN 1016036101/ Anggota
Sudaryanto, SP. MSi-NIDN 1019118002/ Anggota

*“Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Ini Dibiayai
Oleh APBU Universitas Lancang Kuning
Berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan
Pengabdian Kepada Masyarakat
Nomor : 308/ Unilak-LPPM/ B.07/2013”*

**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS LANCANG KUNING
PEKANBARU
TAHUN 2014**

Abstrak

PENGEMBANGAN ORGANISASI KELURAHAN DI KAWASAN EKOWISATA MEMPURA

Oleh: Prihati, Hernimawati dan Sudaryanto – FIA Unilak

Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan Mempura saat ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak berjalannya pengembangan organisasi secara kelembagaan. Indikator yang terlihat diantaranya pengetahuan sumber daya manusia yang kurang, fungsi lembaga yang tidak efektif, partisipasi masyarakat yang rendah, potensi Kelurahan yang tidak terkelola. Kemudian pembuatan proses usul program/ kegiatan yang belum terampil. Tujuan kegiatan pengabdian pada masyarakat di Kelurahan Sei Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak adalah pertama, untuk memberikan pengetahuan teoritis dan praktis kepada aparatur pemerintahan Kelurahan dan masyarakat dalam pengembangan organisasi. Kedua, meningkatkan kualitas aparatur dan masyarakat dalam menciptakan pengembangan organisasi yang berkualitas.

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara ceramah, diskusi dan tugas.

Dari kegiatan pengabdian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa aparatur kelurahan dan masyarakat sudah memiliki pengetahuan teoritis dan praktis dalam pengembangan organisasi kawasan ekowisata. Kemudian, komitmen dari top manajemen dalam organisasi. Selama ini masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya anggaran khusus untuk pembangunan kawasan ekowisata Mempura dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Lingkungan organisasi, awalnya kurang kondusif pasca perubahan Desa Sungai Mempura menjadi Kelurahan Mempura. Hal ini berdasarkan kondisi, dimana pemerintah khususnya pemerintah kelurahan berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat. Penegakan disiplin yang awalnya kurang sudah mulai membaik. Khususnya dari aparatur kelurahan. Aparatur dan masyarakat sudah memiliki pengetahuan teoritis dan praktis dalam pengembangan organisasi kawasan ekowisata, khususnya Mempura. Kualitas aparatur dan masyarakat sudah meningkat dalam menciptakan pengembangan organisasi kawasan ekowisata.

Kata Kunci: Pengembangan, Organisasi dan Mempura

Abstract

**WARD DEVELOPMENT ORGANIZATION
IN ecotourism MEMPURA**

By: Prihati, Hernimawati and Sudaryanto - FIA Unilak

The Governance and development in Sub Mempura is still not going well. This is evidenced by the ineffectiveness of organization with institutional development. Visible indicators include human resource knowledge is lacking, ineffective institutions function, low public participation, the potential of the Village that are not managed. Then the process of making motion programs / activities that have not skilled. The purpose of community service activities in the Village District of Sei Mempura Mempura Siak is the first, to provide theoretical and practical knowledge to the Village government officials and the public in the development of the organization. Second, improve the quality of personnel and the community in creating a quality organization development.

Method of implementation of community service performed by means of lectures, discussions and assignments.

Of service activities are done shows that the village officials and the public already has a theoretical and practical knowledge in the development of ecotourism organization. Then, the commitment of top management in the organization with. For this is still lacking. This is evidenced by the absence of a special budget for the development of ecotourism Mempura within the last 4 years. Environmental organizations, initially less favorable post-change into the Village River Village Mempura Mempura. It is based on the condition, in which the government especially the government run itself without the support of village communities. Enforcement of discipline is initially less has improved. Especially from village officials. Apparatus and communities already have the theoretical and practical knowledge in the organization pengemangan ecotourism, especially Mempura. Quality has improved apparatus and society in creating organizational development ecotourism.

Keywords: Development, Organization and Mempura

A. Pendahuluan

Masyarakat Kelurahan Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, sudah saatnya meningkatkan pola pikir hingga level pola pikir Kecamatan, tidak hanya sebatas pola pikir Kelurahan semata. Karena wilayah Kelurahan Mempura merupakan bagian dari Kecamatan dan ibukota serta menjadi lokasi berdirinya pusat Pemerintahan Kabupaten Siak. Pemkab Siak telah memberikan perhatian khusus kepada Kelurahan Mempura, dengan harapan tentunya dapat menggiring masyarakat Mempura menjadi masyarakat yang memiliki pola fikir lebih maju dan baik dibanding Kelurahan lain.

Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan Mempura saat ini masih belum berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tidak berjalannya pengembangan organisasi secara kelembagaan. Indikator yang terlihat diantaranya pengetahuan sumber daya manusia yang kurang, fungsi lembaga yang tidak efektif, partisipasi masyarakat yang rendah, potensi Kelurahan yang tidak terkelola. Kemudian pembuatan proses usul program/ kegiatan yang belum terampil.

Berdasarkan hal tersebut, maka diperlukan pengembangan organisasi. Berangkat dari kelemahan tersebut implementasi pola perencanaan revitalisasi pola perencanaan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif dimulai dari penyiapan dan penguatan institusi perencanaan. Pola perencanaan pembangunan Kelurahan partisipatif menekankan pelibatan partisipasi aktif semua peserta forum musyawarah perencanaan dan meningkatkan bobot keterwakilan masyarakat dalam forum perencanaan. Paradigma lama pembangunan perKelurahan pada masa sebelum era otonomi adalah bagaimana melaksanakan program-program pemerintah yang datang dari atas. Program pembangunan Kelurahan lebih banyak dalam bentuk proyek dari atas, dan sangat kurang memperhatikan aspek keberlanjutan pembangunan Kelurahan dan partisipasi masyarakat. Sebagian besar kebijakan Pemerintah bernuansa “top-down”, dominasi Pemerintah sangat tinggi, akibatnya antara lain banyak terjadi pembangunan yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, tidak sesuai dengan potensi dan keunggulan Kelurahan, dan tidak banyak mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan lokal.

B. Tinjauan Pustaka

Pengembangan organisasi didefinisikan sebagai upaya pimpinan yang terencana dalam meningkatkan efektivitas organisasi, dengan menggunakan cara intervensi (oleh pihak ketiga) yang didasarkan pada pendekatan perilaku manusia (Danang dan Burhanudin, 2011).

Pengembangan organisasi menurut para ahli :

a. Warren G. Bennis

Pengembangan organisasi adalah suatu jawaban terhadap perubahan, suatu strategi pendidikan yang kompleks yang diharapkan untuk merubah kepercayaan, sikap, nilai, dan susunan organisasi, sehingga organisasi dapat lebih baik dalam menyesuaikan dengan teknologi, pasar dan tantangan yang baru serta perputaran yang cepat dari perubahan itu sendiri.

b. Richard Beckhard

Pengembangan organisasi adalah suatu usaha berencana, meliputi organisasi keseluruhan, diurus dari atas meningkatkan efektivitas organisasi melalui pendekatan berencana dengan proses organisasi, dengan memakai pengetahuan ilmu perilaku.

Issue-issue yang berkaitan dengan etika di dalam pengembangan organisasi melibatkan bagaimana para praktisi melaksanakan peran bantuan mereka dengan klien. Para praktisi ini merupakan bagian dari objek/orang-orang yang terlibat dalam penelitian operasi. Pengembangan organisasi senantiasa menunjukkan perhatiannya terhadap pelaksanaan yang berkaitan dengan etika para praktisi, dan pada akhir-akhir ini sebuah kode yang berkaitan dengan etika untuk praktek pengembangan organisasi telah dikembangkan oleh berbagai macam asosiasi profesional di dalam pengembangan organisasi. Issue-issue yang berkaitan dengan etika di dalam pengembangan organisasi cenderung untuk muncul di sekitar issue-issue berikut ini, seperti : pemilihan intervensi, menggunakan informasi, menahan servis, ketergantungan klien, pemilihan partisipasi, dan memanipulasi klien (Olivia, 2008).

C. Metode Pelaksanaan

Metode pelaksanaan pengabdian masyarakat dilakukan dengan cara ceramah, diskusi dan tugas. Metode ceramah dilakukan dengan cara memberikan penjelasan materi tentang peran dan fungsi perencanaan di tingkat Kelurahan baik pada organisasi pemerintahan Kelurahan, badan permusyawaratan Kelurahan (BPD), lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM), organisasi perempuan Kelurahan, dan organisasi karang taruna Kelurahan. Keseluruhan unsur – unsur kelembagaan di tingkat Kelurahan tersebut, akan diberikan informasi dan pengetahuannya di dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam melakukan kegiatan perencanaan pembangunan.

Disamping itu juga diberikan materi dan penjelasan pemanfaatan tentang penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengevaluasian kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan di tingkat Kelurahan. Dalam hal lain juga di berikan pemahaman pengetahuan tentang pelaksanaan kegiatan politik di tingkat Kelurahan serta pemahaman perlunya peranan gender dalam kegiatan di pemerintahan dan pembangunan di Kelurahan.

Metode diskusi yaitu dilakukan setelah metode ceramah dan penjelasan diberikan dan selanjutnya memberikan kesempatan kepada para peserta pengabdian untuk bertanya jawab dan memecahkan persoalan – persoalan masyarakat di dalam kegiatannya secara ke organisasian masing – masing.

Tugas dilaksanakan dengan cara membentuk masing – masing kelompok di antara peserta dengan memberikan tema atau topik. Topik permasalahan tersebut akan di bahas dan dipecahkan oleh masing – masing kelompok, untuk selanjutnya akan di persentaskan oleh masing – masing kelompok di hadapan nara sumber. Dari hasil topik tersebut yang telah di bahas oleh pesereta kelompok tersebut, akan di jadikan rekomendasi bagi Kelurahan untuk merencanakan program pembangunan.

D. Hasil

Dari kegiatan pengabdian yang dilakukan diperoleh hasil :

- Aparatur kelurahan dan masyarakat sudah memiliki pengetahuan teoritis dan praktis dalam pengembangan organisasi kawasan ekowisata. Kemudian kualitas aparatur dan masyarakat sudah semakin meningkat dari hasil kegiatan pengabdian yang dilakukan.
- Komitmen dari top manajemen dalam organisasi. Selama ini masih kurang. Hal ini dibuktikan dengan belum adanya anggaran khusus untuk pembangunan kawasan ekowisata Mempura dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Terjadi perbedaan pandangan dari Bupati yang menggagas yakni Arwin AS, dengan Bupati saat ini Drs Syamsuar MSi, yang belum mendukung kegiatan di kawasan ekowisata Mempura. Hal ini dibuktikan dengan semakin rusaknya fasilitas yang selama ini sudah dibangun seperti pondok. Namun dari kegiatan pengabdian yang dilakukan sudah ada komitmen untuk kembali membangun organisasi.
- Lingkungan organisasi. Awalnya kurang kondusif pasca perubahan Desa Sungai Mempura menjadi Kelurahan Mempura. Hal ini berdasarkan kondisi, dimana pemerintah khususnya pemerintah kelurahan berjalan sendiri tanpa dukungan masyarakat. Dari kegiatan pengabdian, aparatur dan masyarakat sudah diarahkan untuk kembali membangun lingkungan organisasi yang kondusif sebagaimana ketika masih dalam ruang lingkup desa. Bahkan aparatur dan masyarakat menyambut baik jika dilakukan kerjasama lanjutan antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Universitas Lancang Kuning.
- Disiplin. Penegakan disiplin yang awalnya kurang sudah mulai membaik. Khususnya dari aparatur kelurahan. Ini dilakukan dengan menertibkan jadwal jam kerja yakni masuk pukul 08.00 pulang 15.00. Kondisi ini relatif lebih baik karena pada saat dalam ruang lingkup desa, jam kerjanya tidak jelas.

E. Pembahasan

Dalam rangka pengembangan organisasi kawasan ekowisata ditentukan oleh factor kebijakan. Kebijakan pengembangan pariwisata yang dimaksud adalah:

1. Kebijakan Pokok
 - a. Mewadahi, membangun dan mengembangkan manfaat potensi pariwisata sebagai kegiatan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja.
 - b. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur serta pemberdayaan tugas dan fungsi organisasi sebagai fasilitator dan regulator pengembangan pariwisata.
 - c. Meningkatkan kesempatan berusaha dan keterlibatan masyarakat dalam mengembangkan kawasan wisata
 - d. Melaksanakan kerjasama pariwisata antar daerah dan dunia usaha.
2. Kebijakan Spasial (keruangan) Pariwisata
 - a. Memberikan arahan yang jelas bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak berdasarkan karakteristik keruangannya melalui penetapan zonasi pengembangan.
 - b. Untuk kemudahan pembangunan serta pengelolaannya, perlu dilakukan pengelompokkan obyek dan daya tarik wisata pada Satuan Kawasan Wisata (SKW). Satuan-satuan kawasan wisata tersebut merupakan kawasan yang memiliki pusat-pusat kegiatan wisatawan dan mempunyai keterkaitan sirkuit atau jalur wisata.
 - c. Melakukan urutan prioritas pengembangan satuan kawasan wisata dengan memperhatikan dampaknya terhadap perkembangan obyek dan daya tarik wisata.
3. Kebijakan Pengembangan Produk Wisata
 - a. Asas keberlanjutan (sustainability), keserasian (harmonizes), keterjangkauan (affordability) dan kerakyatan merupakan landasan pokok dalam pengembangan produk wisata.

- Keberlanjutan mengandung arti : pengembangan produk wisata bukan hanya ditujukan bagi pengembangan saat ini saja, tetapi juga untuk masa yang akan datang.
 - Harmonisasi mengandung arti : pengembangan produk wisata yang bernuansa lingkungan hidup, yaitu dengan selalu memperhatikan kelestarian alam, adat istiadat dan budaya daerah.
 - Keterjangkauan mengandung arti : pengembangan produk wisata tidak hanya ditujukan bagi kalangan tertentu, tetapi produk wisata yang dikembangkan tersebut harus dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.
 - Kierakyatan mengandung arti : pengembangan produk wisata tidak hanya menguntungkan beberapa golongan tertentu tetapi harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terutama masyarakat sekitar obyek dan potensi wisata yang bersangkutan.
- b. Pengembangan produk wisata diarahkan bagi penguatan identitas daerah yang dapat memunculkan “warna” pariwisata kabupaten Siak yang khas serta memiliki keunikan dan keunggulan daya saing oleh karenanya diperlukan penggalian, penataan dan pengembangan diversifikasi produk wisata.
 - c. Perlunya penetapan produk wisata unggulan bagi Kabupaten Siak sebagai faktor penarik utama bagi pengembangan pariwisata di Kabupaten Siak.
 - d. Obyek-obyek dan daya tarik wisata budaya dan kesenian daerah serta event-event pariwisata masih harus didukung oleh Pemerintah Daerah melalui pengembangan dan pematapan pembinaan seni budaya dan penyelenggaraan event seni budaya tertentu.
4. Kebijakan Pengembangan Obyek dan Daya Tarik Wisata
 - a. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata menyangkut aspek perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian yang satu sama lainnya merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, oleh karenanya pembangunan obyek dan daya tarik wisata harus didasarkan pada sistem perencanaan.

- b. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan berdasarkan pendekatan pembangunan Satuan Kawasan Wisata dengan nuansa nilai agama, budaya, estetika dan moral yang dianut oleh masyarakat.
 - c. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dilakukan sesuai dengan mekanisme pasar dan meliputi wisata alam, wisata budaya, wisata minat khusus, wisata pantai dan wisata petualangan.
5. Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata
- a. Penyiapan sistem perencanaan Tata Ruang Kawasan Wisata
 - b. Meningkatkan aksesibilitas ke kawasan wisata
 - c. Pemenuhan fasilitas standar (fasilitas kesehatan, keamanan, kebersihan, komunikasi) di kawasan wisata sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Menarik investor untuk membangun akomodasi dan fasilitas penunjang lainnya.
6. Kebijakan Pemasaran dan Promosi Wisata
- a. Penataan dan pengembangan sistem informasi pariwisata yang efektif secara komprehensif dengan akses pasar dalam dan luar negeri.
 - b. Mengembangkan pola kerjasama promosi antar daerah dan dengan dunia usaha pariwisata.
 - c. Mengikuti pelaksanaan event promosi di tingkat internasional, nasional, regional maupun penyelenggaraan kegiatan promosi dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan festival kepariwisataan di daerah.

Kemudian seluruh organisasi pariwisata harus bersatu. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menyarankan seluruh organisasi pariwisata di Indonesia bersatu agar peta industri dan sektor pariwisata di Tanah Air semakin baik.

Seluruh organisasi pariwisata harus bersatu untuk membangun sektor ini menjadi lebih baik. Sektor pariwisata Indonesia perlu dipetakan menjadi lebih baik agar lebih mudah dalam melaksanakannya di lapangan.

Kemenparekraf siap untuk mendukung seluruh program organisasi pariwisata demi mendukung pertumbuhan sektor tersebut. Sektor pariwisata ini sangat potensial untuk bisa langsung menggerakkan sektor riil di negara kita.

Hingga saat ini, Kemenparekraf memantau ada 36 organisasi yang bergerak di bidang pariwisata di Indonesia. Dia juga berharap seluruh organisasi pariwisata itu bergabung dalam Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) yang beroperasi atas dasar UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan pada pasal 50.

Gabungan organisasi ini menjadi media konsolidasi antarorganisasi pariwisata dalam rangka menyatupadukan langkah memajukan dan menyejahterakan bangsa Indonesia melalui pariwisata.

Organisasi pariwisata, diharapkan bisa mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata agar memiliki keunggulan kompetitif dan menghimpun potensi para anggota di bidang usaha dan profesi kepariwisataan. Organisasi pariwisata perlu menjadi mitra kerja pemerintah dalam pelaksanaan dan penerapan kebijakan kebijakan pengembangan dan pembangunan kepariwisataan.

F. Kesimpulan:

- Aparatur dan masyarakat sudah memiliki pengetahuan teoritis dan praktis dalam pengemangan organisasi kawasan ekowisata, khususnya Mempura.
- Kualitas aparatur dan masyarakat sudah meningkat dalam menciptakan pengembangan organisasi kawasan ekowisata.

G. Saran

- Perlu dibentuk satu organisasi khusus yang menangani kawasan ekowisata Mempura.
- Dibutuhkan realisasi anggaran baik dari pemerintah maupun swasta untuk membangun kawasan ekowisata Mempura.

DAFTAR PUSTAKA

- Azwar, Saifuddin, 2008, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Edisi 3,
Yogyakarta: Putaka Belajar
- Bake, Jamal, 2009, Pendekatan 4P Kreatif: Pengertian dan Model Pengukuran
Kreatifitas dan Inovasi.
- Dongoran, Johnson, 2009, Siklus Hidup Organisasi dan Gaya Kepemimpinan.
- Fachrunnisa, Olivia, 2008, Perbedaan Gender dalam Penggunaan Gaya
Kepemimpinan Transformasional : Suatu Pengujian dari Perspektif
Atasan, Bawahan, Rekan Kerja dan Diri Sendiri.
- Purwanto, Djoko, 2011, Komunikasi Bisnis, Jakarta, Erlangga.
- Danang dan Burhanudin, 2011, Perilaku Organisasi, CAPS, Yogyakarta.
- Beddy Iriawan, Sistem Politik Indonesia, Penerbit PT Raja Grafindo Persada,
Jakarta, 2012.
- Kaelan, Pendidikan Pancasila, Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2010.
- Padmo dan Nazaruddin, Pengantar Ilmu Politik, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Peraturan Pemerintah (PP) No.72 tahun 2005 tentang Kelurahan
- Rian Nugroho dan Randy Wrihatnolo, 2011, "*Manajemen Perencanaan
Pembangunan*", Penerbit PT Elex Media Komputindo – Kompas Gramedia,
Jakarta.
- Ridwan, Hukum Administrasi Negara, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Subhan Sofhian dan Asep Said, Pendidikan Kewarganegaraan, Penerbit
Fokusmedia, Bandung, 2011.